

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan public lebih luas daripada kebijakan sosial. Kebijakan transportasi, jalan raya, air, pertanahan, keamanan dan lain sebagainya yang diatur dalam undang-undang merupakan kebijakan public. Sedangkan kebijakan sosial seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu publik yang berkembang, yakni mengatasi permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam arti sempit kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberian berbagai tunjangan pendapatan, tunjangan sosial dan pelayanan kemasyarakatan. Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial, mengatasi masalah sosial dan mempromosikan kesejahteraan sosial sebagai wujud kewajiban suatu negara untuk memenuhi hak-hak sosial warga negara.

Pada dasarnya kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan (Midgley, 2000) berikut penjelasannya:

a. Peraturan dan perundang-undangan

Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan public yang menatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan.

b. Program pelayanan sosial

Kebijakan diwujudkan dan dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial dalam bentuk bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, dan pendampingan).

c. Sistem perpajakan

Merupakan sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan mencapai distribusi pendapatan yang adil. Bantuan publik dan asuransi sosial merupakan dua bentuk jaminan sosial dari pemerintah yang dananya sebagian berasal dari pajak.

Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan memerlukan bantuan seperti keluarga miskin, anak terlantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba dan kelompok masyarakat yang rentan baik secara ekonomi ataupun psikososial.

B. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Permasalahan sosial yang ada di masyarakat seperti permasalahan mengenai anak jalanan dan gelandangan sampai saat ini belum sepenuhnya selesai. Terlebih jika permasalahan anak jalanan dikaitkan dengan hak anak terutama pendidikan yang semakin tidak beraturan. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya terutama dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat. Namun ketika pemerintah lamban ataupun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut masyarakat itu sendiri yang akan turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Entah hal itu merupakan bentuk protes atau masyarakat sudah jenuh menunggu pemerintah yang lamban menangani permasalahan terdapat pergerakan dari masyarakat itu sendiri. Pergerakan itu disebut partisipasi masyarakat.

Menurut Khadiyatno (2007:31) menjelaskan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauman menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Sedangkan menurut Davis yang dikutip oleh Sastropetro (1998:13) partisipasi ialah

keterlibatan mental, pikiran, emosi dan perasaan seseorang dalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Berhubungan dengan permasalahan sosial anak jalanan terutama dalam hal pendidikan maka partisipasi masyarakat ini sangatlah penting. Partisipasi yang ada dalam membantu anak jalanan dalam mendapatkan pendidikan meskipun seadanya harus diapresiasi pemerintah, karena dari partisipasi masyarakat yang peduli terhadap nasib anak jalanan tersebut tugas pemerintah menjadi lebih ringan dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat.

Defini yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwasannya partisipasi masyarakat merupakan gerak, respon dan tanggapan masyarakat dalam setiap kegiatan yang tujuannya membangun atau menyelesaikan masalah yang terdapat dalam masyarakat sehingga masyarakat terlibat langsung didalamnya dengan memberikan kemampuan pikiran, tenaga maupun dana dalam setiap kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan memiliki arti yang penting. Hal ini dikarekan tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan tidak akan maksimal, selain masyarakat yang menikmati pembangunan tersebut, masyarakat juga bisa mengawasi proses pembangunan yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan.

2. Macam Jenis dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Terdapat berbagai macam bentuk partisipasi yang ada dalam masyarakat. Salah satunya menurut Rusidi yang dikutip oleh Siregar (2001:21) menjelaskan ada empat dimensi dalam berpartisipasi, diantaranya:

- a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
- b. Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
- c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja)
- d. Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Selain itu menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Syamsi (1994:114) membedakan empat jenis partisipasi, antara lain:

- a. Partisipasi dalam perencanaan

Partisipasi ini merupakan keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan langkah yang dilakukan.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan program, pelaksanaan maupun tujuan.

- c. Partisipasi dalam mengambil manfaat

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas pelaksanaan program yang telah dicapai sebelumnya.

d. Partisipasi dalam mengevaluasi

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang direncanakan atau terdapat penyimpangan didalamnya.

Adapun macam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Suryono (2001:124), sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi.
- b. Partisipasi dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima baik yang bermaksud menolak maupun menerima.
- c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk perencanaan pembangunan termasuk dalam mengambil keputusan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi masyarakat dalam menilai hasil pembangunan.

Berdasarkan uraian mengenai berbagai macam bentuk dan jenis partisipasi masyarakat diketahui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan penyelesaian masalah dari materi, tenaga, ataupun pikiran merupakan secara sukarela mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Diharapkan dari partisipasi yang muncul dalam masyarakat

pembangunan akan segera tercapai dengan maksimal dan menyeluruh serta tidak ada lagi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

3. Faktor Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang merupakan bentuk gerakan dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut. Tjokroamidjojo (1995:226) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya partisipasi masyarakat, diantaranya:

a. Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan diperlukan adanya seseorang yang mampu untuk menggerakkan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk membantu pemerintah, maka dari itu diperlukan seorang pemimpin yang berkualitas.

b. Faktor Komunikasi

Komunikasi dimaknai sebagai suatu proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain dalam suatu kelompok, organisasi dan masyarakat agar saling mempengaruhi di antara yang menyampaikan, yang disampaikan atau yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Steward yang dikutip oleh

Tjokroamidjojo (1995:226) menjelaskan keberhasilan komunikasi ialah apabila terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam proses komunikasi itu sendiri yaitu: sumber (*resource*), pesan (*message*), saluran atau media (*chanel*), penerima (*receiver*) dan tanggapan atau respon (*feedback*)

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang memadai secara otomatis dapat memberikan partisipasi yang diberikan karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi baru.

Menurut Barlian (2000) peran serta masyarakat dipengaruhi beberapa hal, diantaranya:

a. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan sebagai salah satu sub sistem sosial yang terorganisir dan berusaha mengembangkan kemampuan, sikap, nilai dan pengetahuan para warga negara menuju terbinanya warga negara yang dewasa, baik secara ekonomis, cultural, religious maupun etis sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan unsur bagi setiap kehidupan manusia, karena dari penghasilan sendiri manusia mampu meningkatkan

kesejahteraannya. Dengan pendapatan yang tinggi ataupun cukup seseorang tidak hanya memikirkan kebutuhan dirinya sendiri, tetapi juga dapat berbagi dan menyisihkan penghasilan untuk kebutuhan hidup orang lain.

c. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mampu melahirkan pandangan atau prespektif yang berbeda dari beberapa orang untuk menyampaikan informasi baru ataupun mempengaruhi orang lain dalam setiap partisipasi masyarakat.

Jadi dari beberapa penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dari para ahli terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut bisa dari dalam proses penyampain informasi dalam masyarakat, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar proses penyampain informasi dalam masyarakat.

C. Intervensi Sosial

1. Definisi Intervensi Sosial

Permasalahan yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat kompleks dan rumit, terutama permasalahan yang menyangkut tentang anak jalanan. Manusia sebagai makhluk sosial dan aktor dalam kehidupan pasti berinteraksi satu sama lain, saling bekerja sama, memiliki rasa kebersamaan, dan hidup tolong menolong terutama dalam mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah di nilai belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan sehingga muncul partisipasi dalam masyarakat yang dapat membantu kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Partisipasi itu muncul dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas sosial yang peduli akan permasalahan yang dihadapi anak jalanan. Lembaga swadaya masyarakat ataupun komunitas-komunitas tersebut pastinya memiliki cara atau strategi dalam membantu menyelesaikan permasalahan anak jalanan, hal ini disebut Intervensi Sosial.

Menurut Ralft Dolgofft yang dikutip oleh Lowenberg (1972:3) menjelaskan Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok dan komunitas) dalam bidang kesejahteraan sosial. Pekerjaan sosial merupakan bidang yang meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya mengfungsikan kembali fungsi sosial seseorang atau kelompok yang tidak

berfungsi dengan baik agar berfungsi kembali dalam masyarakat. Sedangkan menurut Adi (2005: 141) menjelaskan bahwa intervensi sosial merupakan upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok ataupun komunitas. perubahan terencana tersebut bertujuan agar bantuan yang diberikan dapat di evaluasi dan di ukur tingkat keberhasilannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Intervensi sosial merupakan upaya mengembalikan atau memperbaiki fungsi sosial dari sasaran perubahan seperti seseorang ataupun kelompok masyarakat dengan suatu cara ataupun strategi yang terencana dari seseorang ataupun kelompok yang kondisinya lebih baik dalam bidang pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dalam intervensi sosial ini ialah membantu seseorang atau kelompok sasaran perubahan mengalami perubahan yang diinginkan, sehingga fungsi sosial dalam masyarakat kembali berfungsi dengan baik karena dengan begitu kesejahteraan akan mudah dicapai. Kesejahteraan yang dimaksud adalah jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar.

2. Metode Intervensi Sosial

Menurut Adi (2013: 161) metode intervensi sosial dibagi menjadi tiga level metode dalam pengelompokan pelaksanaan intervensi sosial diantaranya ialah intervensi sosial level mikro, intervensi sosial level meso dan intervensi sosial level makro. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pelaku intervensi melakukan kegiatan untuk membantu seseorang atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam

mengembalikan fungsi sosialnya dalam masyarakat, sehingga kelompok pembantu mengetahui cara atau strategi apa yang perlu diperlukan dalam mengatasi yang sedang dihadapi, berikut penjelasan mengenai tingkatan setiap level intervensi sosial:

a. Metode Intervensi sosial level mikro

Metode ini mencakup individu, keluarga dan kelompok kecil dalam masyarakat. Intervensi sosial pada level individu pada dasarnya berhubungan dengan upaya memperbaiki atau meningkatkan fungsi sosial dalam masyarakat. Fungsi sosial yang dimaksud kemampuan individu menjalankan peran sosialnya sesuai harapan masyarakat karena dalam bermasyarakat terdapat aturan nilai, norma dan aspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Peran lingkungan sangatlah penting dalam pengembalian atau peningkatan fungsi sosial individu.

Adapun intervensi sosial pada keluarga, menurut Zastrow yang dikutip oleh Adi (2013:175) intervensi sosial dalam keluarga dilakukan dengan melihat keluarga sebagai suatu sistem yang anggotanya saling berinteraksi dan mempunyai rasa saling ketergantungan antar anggota keluarga. Permasalahan yang timbul biasanya dipengaruhi dinamika dalam keluarga sehingga tidak bisa menggunakan fungsi sosial dalam masyarakat, karena jika salah satu anggota keluarga tidak mampu menggunakan fungsi sosial akan berdampak pada keluarga tersebut, sehingga pemberian dukungan moral dari anggota keluarga yang lain

mempunyai peran yang vital untuk mengembalikan fungsi sosial salah satu anggota keluarga yang bermasalah.

Sedangkan intervensi sosial kelompok kecil yang dimaksud ialah kelompok yang terdiri dari dua sampai sepuluh orang dan saling berinteraksi secara langsung karena sadar keberadaan sebagai anggota kelompok yang mempunyai rasa ketergantungan serta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga kelompok bisa digunakan sebagai meningkatkan fungsi sosial anggotanya (Adi,2013:182). Upaya pengembangan fungsi kelompok atau anggotanya menggunakan metode perubahan terencana yang disebut *group work*. Skidmore, Thackeray dan Farley yang dikutip oleh Adi (2013:182) menyatakan *group work* ialah suatu metode yang dilakukan terhadap seseorang dalam suatu kelompok untuk meningkatkan fungsi sosial dari individu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan didasari pada pengetahuan tentang kebutuhan dan keterkaitan diantara keduanya, dengan kata lain *group work* ialah metode untuk mengurai atau menghilangkan hambatan untuk berinteraksi sosial dan mencapai tujuan-tujuan yang sesuai dengan norma masyarakat. *Group work* juga dapat diartikan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kelompok kecil dengan memfasilitasi anggota kelompok untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dalam proses pemecahan masalah melalui kelompok.

b. Metode intervensi sosial level meso

Pada level meso permasalahan yang terjadi lebih besar dari pada level mikro karena metode ini mencakup kelompok komunitas dan organisasi. Intervensi sosial level meso terkait dengan model intervensi pengembangan masyarakat dan pendekatan pelayanan masyarakat. Fokus metode intervensi ini ialah bagaimana kelompok komunitas ataupun organisasi dapat diterima oleh masyarakat lingkungan tempat tinggal kelompok komunitas ataupun organisasi tersebut, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam lingkungan tersebut komunitas ataupun organisasi mampu langsung turun tangan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Intervensi sosial pada level meso merupakan strategi yang mengembangkan peran serta partisipasi masyarakat dengan tahapan variasi dalam penerapannya. Menurut Adi (2013:206) tahapan tersebut dimulai dari:

- a. Tahap persiapan;
- b. Tahap *assessment*;
- c. Tahap perencanaan alternatif program;
- d. Tahap pemformulasian rencana;
- e. Tahap pelaksanaan;
- f. Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan;
- g. Tahap terminasi.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahapan yang selalu berputar seperti siklus untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik dalam setiap kegiatan sesuai target perubahan yang terjadi di masyarakat mulai dari pengetahuan, keyakinan, sikap, pengalaman belajar, pengembangan diri melalui tindakan yang diinginkan oleh masyarakat sekitar.

c. Metode intervensi sosial level makro

Metode ini mencakup dari kebijakan sosial, negara kesejahteraan dan paradigma kesejahteraan sosial dimana ketiga hal tersebut saling berkaitan dengan permasalahan yang lebih luas dari level intervensi sosial sebelumnya. Menurut Jomrozik yang dikutip Adi (2013:238) ialah suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya agar masyarakat dapat mencapai hasil yang diinginkan, dimana terdapat keterkaitan antara objektif dan tujuan masyarakat melalui cara yang sesuai dengan nilai yang dominan dalam masyarakat.

Negara kesejahteraan mengarah pada pembahasan model kesejahteraan atau sistem kesejahteraan. Menurut Deacon yang dikutip oleh Adi (2013:248) menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki pemerintahan berhak mendapat pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin untuk memenuhi kebutuhannya pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan dan layanan sosial karena negara memiliki kekuatan untuk mengatur layanan dan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menjamin pendapatan minimum,

mempersempit kesenjangan dan menjamin tanpa membedakan status sosial dalam pelayanan.

Pandangan Adi (2013:257) tentang paradigma kesejahteraan sosial itu sendiri terbagi akan paradig residual, paradig institusional dan paradig *developmental*. Paradigma residual merupakan paradigma tentang sistem kesejahteraan sosial yang dikembangkan hanya sistem terakhir untuk membantu anggota masyarakat dengan konsep kesejahteraan sosial yang minimalis. Berbeda halnya dengan paradig institusional dimana peran pemerintah lebih aktif menjamin kesejahteraan warganya karena kesejahteraan sosial merupakan hak warga negara. Sedangkan paradig yang terakhir yakni paradig *developmental* merupakan konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial dimana peran pemerintah menjadi pro-aktif dengan aspek kesetaraan.

3. Prinsip Intervensi Sosial

Pengembalian fungsi sosial seseorang atau kelompok dalam masyarakat merupakan tujuan awal dari intervensi sosial. Adanya perubahan kearah yang lebih baik dari seseorang atau kelompok yang dibantu untuk meningkatkan atau memperbaiki fungsi sosial, maka intervensi sosial dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki fungsi sosial lebih baik. Pelaksanaan intervensi sosial yang efektif diperlukan prinsip-prinsip dasar. Maas yang dikutip oleh Hardjomarsono, dkk (2007: 147) menjelaskan

prinsip dasar intervensi sosial ada enam hal yakni: (a) akseptans; (b) individualisasi; (c) komunikasi; (d) partisipasi; (e) rahasia jabatan; dan (f) *self-awareness*. Keenam prinsip tersebut mempunyai peranan dan fungsi masing-masing berikut penjelasannya:

a. Prinsip Akseptans

Prinsip yang *community worker* yang terpilih mengenali kondisi lingkungan yang akan ditempati dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menerima sasaran perubahan dalam kondisi apapun.

b. Prinsip Individualisasi

Penyesuaian diri *community worker* dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi, selain itu juga menyesuaikan kebutuhan sasaran perubahan yang bersangkutan.

c. Prinsip Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah, dimana perlu adanya komunikasi yang terus menerus dan penjelasan yang rinci antara *community worker* dan sasaran perubahan. Komunikasi bisa dalam bentuk verbal dan komunikasi dalam bentuk non-verbal.

d. Prinsip Partisipasi

Partisipasi di sini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada sasaran perubahan dalam melakukan perkembangan diri setelah permasalahan yang dihadapi, sehingga fungsi sosialnya bisa normal kembali dalam masyarakat.

e. Prinsip Rahasia Jabatan

Seperti halnya kode etik setiap profesi dengan memegang kerahasiaan dan dijaga kerahasiaan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Hal ini diperlukan karena berkaitan dengan masalah martabat dan harga diri manusia.

f. Prinsip *Self-Awareness*

Prinsip ini memberikan peringatan ataupun penjelasan kepada sasaran perubahan bahwa dirinya merupakan manusia biasa dan bagian dari lingkungan sosial masyarakat.

4. Tahapan Intervensi Sosial

Suatu tujuan pasti memiliki langkah-langkah ataupun tahapan yang digunakan dalam pelaksanaannya termasuk dalam kegiatan sampai tujuan bersama dicapai dengan hasil yang baik. Tahapan intervensi ini merupakan salah satu bentuk langkah yang dapat dilakukan di setiap kegiatan komunitas dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi. Menurut Adi (2013: 135) terdapat enam tahapan intervensi sosial diantaranya:

a. Fase Persiapan

Pada fase ini suatu komunitas harus melakukan persiapan seperti mengetahui gambaran umum, adat kebiasaan, kondisi sosiodemografis, dan mempersiapkan isu-isu yang akan terjadi.

b. Fase Pengembangan

Fase ini berkaitan dengan upaya pengembangan relasi dengan komunitas lain atau lingkungan sekitar, dimana *community worker* mengkaji sasaran perubahan.

c. Fase Pengumpulan Data dan Informasi

Terdapat dua bentuk informasi yang digunakan yakni informasi baku dan informasi lunak. Informasi baku yang dimaksud ialah data yang diperoleh dari berbagai laporan resmi, baik yang dikeluarkan lembaga pemerintahan atau organisasi non-pemerintahan, sedangkan informasi lunak ialah data yang sifatnya subjektif atau opini individual.

d. Fase Perencanaan dan Analisis

Fase ini biasanya akan menggunakan kelompok kerja sebagai kelompok utama dalam menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan atau sedang diangkat. Kelompok kerja akan melakukan perencanaan tindakan untuk menentukan tujuan dan solusi permasalahan.

e. Fase Pelaksanaan

Pada fase selanjutnya, rencana yang telah disetujui dan ditentukan langkahnya dalam menyelesaikan masalah diimplementasikan kepada lingkungan dan sasaran perubahan. Biasanya akan terjadi konfrontasi dengan pihak yang bersangkutan, sehingga perlu adanya *community worker* yang telah melakukan pengumpulan data dan informasi tentang masalah terkait untuk dicari solusi permasalahannya.

f. Fase Negosiasi

Negosiasi dilakukan untuk mengetahui apa yang dikehendaki sasaran perubahan yang bersangkutan. Proses negosiasi dilakukan dengan wakil-wakil yang bersangkutan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi sasaran perubahan.

D. Anak Jalanan

1. Definisi Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang saling berkaitan dengan masalah sosial lainnya. Sampai saat ini permasalahan anak jalanan di Indonesia belum sepenuhnya dapat terselesaikan, khususnya di kota-kota besar banyak anak jalanan yang berkeliaran di jalan-jalan protokol, pusat kota, taman, dan lain sebagainya. Departemen Sosial yang dikutip oleh Pardede, (2011:3) mendefinisikan anak jalanan ialah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran dijalanan dan tempat-tempat umum lainnya.

Anak jalanan biasanya berusia 6-18 tahun, masih sekolah maupun putus sekolah, tinggal dengan orang tua ataupun tidak, tinggal dijalanan sendiri ataupun dengan teman-temannya, dan memiliki aktivitas dijalanan secara terus menerus ataupun tidak. Adapun pengertian lain tentang anak jalanan ialah anak yang berusia kurang dari 16 tahun, berada dijalanan untuk hidup maupun bekerja dengan memasuki kegiatan anak jalanan itu sendiri antara

lain mengasong, menjajakan, menjadi joki, pengamen, dan lain sebagainya Tjandraningsing yang dikutip oleh Amarsuteja, (2013).

Fenomena anak jalanan secara umum sebagai akibat dari dua hal mendasar, yaitu: masalah sosiologis dan masalah sosial ekonomi. Masalah sosial yang terjadi umumnya karena orang tua yang kurang perhatian terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anak tersebut mencari perhatian diluar rumah seperti dijalanan sebagai bentuk pelarian. Sedangkan masalah sosial ekonomi didominasi oleh masalah kemiskinan, sehingga para orang tua atau keluarga yang kurang mampu untuk menyediakan kebutuhan dasar anak termasuk kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ada orang tua yang memperkerjakan anaknya untuk turun ke jalan mencari nafkah dan mengabaikan hak seorang anak karena desakan ekonomi keluarga. Anak-anak tersebut kurang mendapatkan waktu bermain dan belajarnya sesuai dengan usianya (Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2006: 1).

2. Jenis Anak Jalanan

Tidak semua anak jalanan terus menerus berada dijalanan, ada beberapa yang masih memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya. Surbakti dkk (1997: 17) menjelaskan jenis-jenis anak jalanan setelah melakukan kajian lapangan, diantaranya adalah:

a. *Children on the street*

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua. Sebagian penghasilan digunakan untuk membantu perekonomian keluarga karena tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan oleh orang tuanya.

b. *Children of the street*

Anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara anak-anak tersebut masih memiliki hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan tidak bisa ditentukan. Banyak diantara anak jalanan tersebut merupakan anak-anak yang karena suatu hal seperti mengalami kekerasan sehingga lari dari rumah.

c. *Children from family of the street*

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Meski anak-anak ini memiliki hubungan keluarga yang cukup kuat, tetapi kehidupan

anak jalanan tersebut tidak menentu, berpindah-pindah tempat dengan segala resiko.

Berbeda halnya dengan kategori yang dijelaskan oleh Sukiadi yang dikutip oleh Bakri (2009:64) ialah sebagai berikut:

a. Anak jalanan yang terikat, dengan ciri-ciri:

- 1) Berada dijalanan karena dorongan ingin memiliki uang sendiri dan membantu orang tuanya;
- 2) Masih memiliki rumah sehingga keterikatan dengan orang tua maupun lingkungan sekitar masih erat;
- 3) Memegang norma atau nilai yang dianut;
- 4) Cenderung beroperasi di dekat rumah dan masih terikat waktu dan tempat.

b. Anak jalanan yang bebas, dengan ciri-ciri:

- 1) Berasal dari keluarga yang telah hidup dijalanan;
- 2) Sudah lama menjadi anak jalanan;
- 3) Anak-anak yang sudah tidak memiliki ikatan dengan keluarga, baik karena konflik ataupun ketidakharmonisan keluarga;
- 4) Tidak terikat dengan waktu dan tempat;
- 5) Cenderung mengabaikan norma-norma kemasyarakatan dan mudah terjerumus pada hal-hal yang bersifat kriminal seperti mengambil barang orang lain, seks bebas, kekerasan, dan lain sebagainya.

3. Karakteristik Anak Jalanan

Anak jalanan memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Menurut Yayasan Nanda Dian Nusantara yang dikutip oleh Hanifah (2005:85) secara umum menyebutkan karakteristik anak jalanan, diantaranya ialah:

- a. Berada di tempat umum seperti jalan, pasar, pertokoan, tempat hiburan, dan lain sebagainya selama 3-24 jam sehari;
- b. Berpendidikan rendah karena putus sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama;
- c. Berasal dari keluarga yang kurang mampu yang kebanyakan kaum urban dan beberapa tidak jelas keluarganya;
- d. Melakukan aktivitas ekonomi seperti pedagang asongan, semir sepatu, pedagang koran, pengamen, mengelap kaca mobil, dan lain sebagainya.

Adapun hasil penelitian menurut Childhope yang dikutip oleh Bakri (2009:63) menjelaskan karakteristik anak jalanan sebagai berikut:

- a. Anak yang berusia 6-12 tahun;
- b. Meninggalkan keluarga;
- c. Memiliki kegiatan keseharian tertentu yang rutin dilakukan dijalanan;
- d. Meninggalkan sekolahnya;
- e. Tinggal di kota.

4. Faktor Anak Jalanan

Keberadaan anak jalanan di tempat-tempat umum biasanya memiliki alasan tertentu, biasanya untuk mencari uang di jalan. Seperti yang dikemukakan Haryadi yang di kutip oleh Agustin yang di kutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang (2005: 17) menjelaskan beberapa faktor keberadaan anak jalanan di tempat-tempat umum, diantaranya:

1. Munculnya kemiskinan;
2. Munculnya keluarga berukuran besar, sehingga ketidakmampuan orang tua memenuhi hak anak;
3. Kurangnya kesempatan kerja produktif dengan imbalan yang memadai bagi orang dewasa dan anggota rumah tangga lainnya;
4. Tidak tersedianya atau tidak memadainya fasilitas kedejahteraan sosial untuk pengangguran dan fakir miskin;
5. Tingginya tingkat anak putus sekolah dari rumah tangga yang kurang mampu;
6. Tidak adanya program pendidikan dan pelatihan yang bermanfaat bagi anak-anak yang putus sekolah.

Pada dasarnya kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak-anak untuk turun ke jalan. Adapun penjelasan lain mengenai faktor keberadaan anak jalanan yang dipaparkan oleh Witnore dan Sutini yang di kutip oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang (2005: 19) ialah sebagai berikut:

1. Keluarga yang berantakan;
2. Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak lari dari rumah;
3. Tidak mempunyai rumah atau sanak saudara bahkan orang tua;
4. Pemaksaan orang tua terhadap anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
5. Kemiskinan ekonomi akan informasi dan sebagainya di dalam keluarga, sehingga mendorong anak untuk mandiri dengan hidup dijalanan;
6. Budaya yang menganggap anak harus mengabdikan kepada orang tua.

E. Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan negara. Pendidikan adalah langkah awal kemajuan suatu bangsa, karena anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita suatu bangsa. pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia.

Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta mendapatkan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal (Muhibbidinsyah, 2003:10). Pendidikan juga dapat diartikan perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, dan kecakapan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk pengaruh

meningkatkan generasi muda ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu membawa tanggung jawab moril dari segala perbuatan yang dilakukan generasi penerus.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan seorang anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai individu dan sebagai warga negara. Dilihat dari sudut pandang perkembangan anak, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditunjukkan untuk membantu anak dalam menghadapi perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Berarti pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak dan menciptakan potensi diri seorang anak untuk kepentingan diri sendiri, lingkungan sekitar dan kemajuan bangsa.

2. Tujuan Pendidikan

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, salah satunya pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat umum mulai dari usia anak-anak sampai usia tua nantinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV tertulis jelas salah satu tujuan bangsa Indonesia dan tujuan pendidikan nasional. Menurut Dirto (1995:59) menjelaskan tujuan pendidikan ialah sistem nilai yang disepakati kebenarannya dan kepentingannya dan ingin dicapai melalui berbagai kegiatan, baik di dalam jalur pendidikan sekolah maupun di jalur pendidikan luar sekolah.

Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang beraklar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman. Undang-Undang No.4 Tahun 1950 junco No.12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan Bab II pasal 3 menjelaskan tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sedangkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Jadi tujuan pendidikan nasional ialah membentuk manusia Indonesia atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan meningkatkan beriman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani rohani, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian yang mantap dan mandiri dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri bangsa dan negara serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

3. Macam-macam Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mendidik seorang anak menjadi pribadi yang berkarakter. Pendidikan memiliki berbagai macam jenis di setiap tingkatan ilmu dan kegiatannya, berikut macamnya:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan tingkatan ilmu sesuai usia anak. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Tinggi, Politeknik, Institut dan Perguruan Tinggi atau

Universitas. Adapun pendidikan formal yang berbasis keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah TSanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) serta adapula sekolah formal yang fokus akan kejuruan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

b. Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang berlangsung di masyarakat, tidak terikat dan memiliki tenaga pengajar yang kadang suka rela dari tokoh masyarakat, seseorang atau kelompok orang yang peduli akan pendidikan masyarakat di suatu tempat.

c. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua masyarakat yang biasanya diberikan kepada anak-anak untuk mengerti dan memahami nilai-nilai etika, moral, dan norma yang berlaku di masyarakat melalui nasihat lisan dan perbuatan.

F. Komunitas

1. Definisi Komunitas

Komunitas bisa dikatakan sama dengan organisasi karena memiliki program kerja dan tujuan bersama yang dicapai bersama-sama oleh setiap anggotanya. Definisi komunitas yang dikemukakan R.M MacIver dan Charles H. yang dikutip oleh Soekanto (2006:133) menyebutkan bahwa komunitas ialah suatu kehidupan sosial yang ditandai oleh derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar masyarakat setempat adalah lokalitas atau tempat

tinggal dan perasaan masyarakat setempat. Adapun pengertian lain menurut Sumijaton (2006: 23) menjelaskan komunitas adalah sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan nilai dan perhatian yang merupakan kelompok khusus dengan batas geografis yang jelas dengan norma dan nilai yang telah melembaga. Definisi lain tentang komunitas ialah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002: 7)

Suatu komunitas pasti memiliki dinamika antar individu atau antar kelompok sosial dan komunitas dimana terjadi interaksi yang terkait secara psikologis yang jelas diantaranya dalam melakukan setiap aksi dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi dari dinamika tersebut diantaranya ialah (1) membentuk kerjasama yang saling menguntungkan, (2) memudahkan pekerjaan dalam mencapai tujuan bersama, (3) mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan pengurangan beban pekerjaan yang besar, sehingga cepat selesai secara efektif dan efisien, dan (4) menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dengan memberikan setiap individu kesempatan untuk memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran, sehingga dari fungsi dinamika komunitas tergambar jelas adanya suatu hubungan yang terikat dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Munculnya komunitas biasanya dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani atau mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. ketika pemerintah pasif dalam menangani permasalahan yang timbul maka dari itu munculah partisipasi masyarakat dengan sendirinya. Partisipasi tersebut muncul dengan sendirinya karena pemerintah dinilai terlalu lamban dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Masyarakat yang kreatif akan mengajak lingkungan sekitar atau orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan akan membantuk suatu kelompok atau komunitas yang nantinya akan membantu pemerintah dalam menangani permasalahan yang timbul di masyarakat dan tak kunjung ditangani pemerintah atau pemerintah kurang dapat menjangkau permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.

Komunitas merupakan suatu kelompok sosial di masyarakat yang tidak terikat dengan pemerintah, namun memiliki peran dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di dasrah. Permasalahan biasanya terkait isu-isu sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Keberadaan komunitas ini kadang diakui kadang pula dibiarkan asal tidak melanggar peraturan daerah yang berlaku mengenai ketertiban umum. Dalam suatu komunitas juga tidak terikat satu sama lain karena fleksibilitas aksi, namun memiliki fungsional di setiap aksi yang dilakukan. Aksi yang dilakukan kemunitas ini bertujuan agar permasalahan yang tidak kunjung diatasi pemerintah dalam diselesaikan sendiri, karena komunitas berada dalam

lapisan masyarakat jadi komunitas itu sendiri dapat merasakan dampak yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, terutama permasalahan sosial.

Adapun unsure-unsur perasaan di dalam komunitas menurut Soekanto (2006:134) ialah sebagai berikut:

a. Seperasaan

Unsur seperasaan timbul akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga semuanya dapat menyebut dirinya sebagai kelompok kami atapun perasaan kami dan lain sebagainya. Pada unsur seperasaan kepentingan-kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan kelompok, sehingga individu dapat merasakan kelompoknya sebagai struktur sosial masyarakat.

b. Sepenanggungan

Setiap individu sadar akan peran dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan perannya dalam kelompok dijalankan sehingga individu tersebut memiliki kedudukan yang pasti. Setiap anggota kelompok juga memiliki beban dan tanggung jawab yang sama akan setiap kegiatan kelompok sehingga unsur sepenanggungan ada dalam setiap kelompok.

c. Saling Memerlukan

Individu yang ada dalam kelompok merasakan dirinya bergantung kepada kemampuan yang meliputi kebutuhan fisik, skill dan psikologis, namun karena setiap individu berbeda-beda tingkat kemampuannya maka setiap anggota kelompok menutupi kekurangan anggota satu dengan anggota lainnya. Sehingga muncul unsur saling memerlukan antar anggota kelompok.

2. Ciri Komunitas

Menurut Glen yang dikutip oleh Adi (2013:112) terdapat ciri-ciri dari setiap aksi komunitas diantaranya:

a. Mempunyai tujuan yang konkret

Setiap aksi yang dilakukan oleh komunitas pasti memiliki tujuan untuk dicapai. Tujuan tersebut biasanya muncul dari isu-isu yang berkembang dalam masyarakat, sehingga muncul sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam menghadapi isu-isu tersebut dan memunculkan solidaritas kolektif yang akan menjadi tenaga penggerak komunitas.

b. Melakukan pendekatan dengan strategi dan teknik

Aksi suatu komunitas pasti terorganisir melalui struktur organisasi di awal berdirinya komunitas tersebut. struktur organisasi yang sederhana agar nantinya komunitas tersebut mudah dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu berdasarkan strategi pendekatan yang telah disetujui dengan melihat kondisi sasaran perubahan.

c. *Community worker* dari setiap aksi

Komunitas harus menunjuk salah satu anggota untuk memimpin suatu aksi ataupun kegiatan komunitas. Aspek yang akan dilakukan nantinya ialah pengorganisasi pergerakan, mobilisasi dan tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

